



RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD	22
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	25
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII : PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas PUPR.....	10
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR	13
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR.....	14
Tabel 2.4. Matrik Tantangan dan Peluang.....	16
Tabel 4.1. Linearitas Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran SKPD	25
Tabel 4.2. Indikator Sasaran dan Target Capaian Indikator Sasaran SKPD	29
Tabel 5.1. Matrik Analisis SWOT	33
Tabel 5.2. Matrik Balance Score Card (BSC)	35
Tabel 5.3. Matrik Linearitas Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.....	37
Tabel 6.1. Rencana program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PUPR.....	42
Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	52

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENSTRA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENSTRA 2017-2022 ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih kongkrit.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Pangkalan Bun, Februari 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Ir. AGUS YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590814 198812 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebuah dokumen perencanaan yang memiliki periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang selama kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan amanat Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah RPJMD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra di Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan tugas pembangunan di bidang infrastruktur. Sesuai amanat dalam Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini menuntut kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksakan program dan kegiatan terkait urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan dan jembatan, jasa konstruksi, dan penataan ruang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan riil penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun landasan operasionalnya meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dimana harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta memberikan arah pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu lima (5) tahun mendatang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Artinya bahwa, setiap pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat berkenaan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selama periode yang ditetapkan harus merujuk dan berpedoman pada program dan kegiatan yang telah diinisiasi dalam dokumen ini. Dengan kata lain, tidak ada pembangunan, kegiatan atau program yang menyelisihinya setiap agenda yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan visi Kepala Daerah melalui misi, program, kegiatan dan sasaran berkenaan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Menjamin komitmen seluruh pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk berperan sesuai dengan kewenangan serta seluruh jajaran SKPD yang terkait;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bagi pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan provinsi dan nasional;
4. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjelaskan isu-isu strategis, program-program kerja, kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Program-program tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara bersinergi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi :

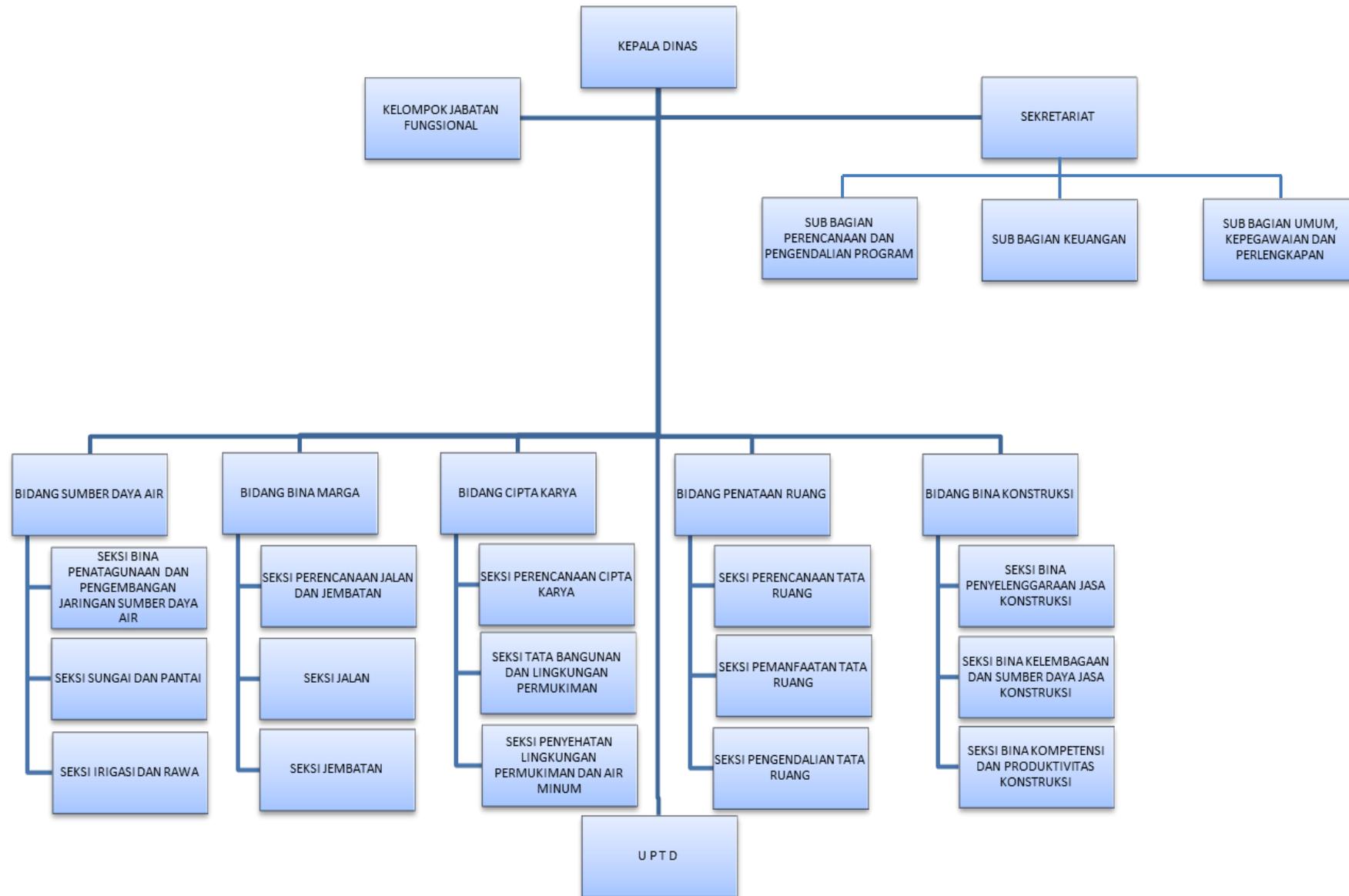
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - (1) Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
 - (2) Seksi Sungai dan Pantai
 - (3) Seksi Irigasi dan Rawa
 - b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
- (2) Seksi Jalan;
- (3) Seksi Jembatan.
- c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - (1) Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 - (2) Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman;
 - (3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum.
- d. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
 - (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - (2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - (3) Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- e. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - (1) Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
 - (2) Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - (3) Seksi Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).



2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sampai akhir tahun 2016, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercatat pegawai sebanyak 85 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah.

a. Data pegawai negeri sipil menurut pendidikan :

No	Uraian	Akhir tahun 2016
1	S2	8
2	S1	36
3	Sarjana Muda	7
4	SLTA	32
5	SLTP	1
6	SD	1
	Jumlah	85

b. Data pegawai negeri sipil menurut pangkat dan golongan :

No	Uraian	Akhir tahun 2016
1.	Golongan I/a	-
	Golongan I/b	-
	Golongan I/c	1
	Golongan I/d	1
	Jumlah Gol I	2
2.	Pengatur Muda (II/a)	2
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	3
	Pengatur (II/c)	19
	Pengatur Tk. I (II/d)	3
	Jumlah Gol II	27
3.	Penata Muda (III/a)	7
	Penata Muda Tk.I (III/b)	25
	Penata (III/c)	10
	Penata Tk.I (III/d)	8
	Jumlah Gol III	50
4.	Pembina (IV/a)	4
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Jumlah Gol IV	6

c. Data pegawai negeri sipil menurut eselon :

No	Uraian	Akhir tahun 2016
	Eselon I	-
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon IIIa	1
	Eselon IVa	13
	Fungsional	-
	Staf	66
	Jumlah	85

d. Data pegawai tidak tetap (honorer) :

No.	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Tidak Tetap	94
	Total	94

Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan Kantor Gedung Kantor Dinas PUD		3.172	M ²	9.516.000,-	
2.	Tanah Bangunan Gedung UPTD		4.000	M ²		
3.	Bangunan Gedung Kantor Dinas PUD /Sekretariat		208	M ²		
4.	Bangunan Gedung Kantor Bidang Pengairan+Bina Marga (Bertingkat)		443	M ²		
5.	Bangunan Gedung Kantor Bidang Cipta Karya		160	M ²		
6.	Bangunan Gedung Kantor Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Makam		228,16	M ²		
7.	Bangunan Gedung Keuangan		50	M ²		
8.	Bangunan Gedung Kantor UPTD		120	M ²		
9.	Bangunan Gedung Laboratorium		248	M ²		
10.	Bangunan Gedung Alkal		89	M ²		
11.	Bangunan Bengkel/Work Shop		240	M ²		
12.	Rumah Jaga UPTD		30	M ²		
13.	Bangunan Pos Jaga UPTD		4	M ²		
14.	Bangunan Gedung Koperasi		164	M ²		

15.	Barak Pasukan Kuning		366	M ²		
16.	Bangunan Mushola Dinas PUD		27,5	M ²		
17.	Bangunan Mushola UPTD		16	M ²		
18.	Bangunan Rumah Genset		16	M ²		
19.	Garasi Truck Kebersihan		348	M ²		
20.	Garasi Alat Berat		288	M ²		
21.	Tempat Parkir		414	M ²		
22.	Pagar Keliling Dinas PUD		270	M'		
23.	Pagar Keliling UPTD		316	M'		
24.	Pembangunan Gudang Arsip		50	M ²		2 (dua) lantai
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Teralis Besi Kantor		19	Buah		
2.	Sumur Pompa		1	Unit		
3.	Gorden Kantor dan Perlengkapannya		474	M'		
4.	Gorden Aula		4	Buah		
5.	Meja & Kursi Kepala		1	Unit		
6.	Meja & Kursi Sekretaris/Kabid		6	Unit		
7.	Meja & Kursi Kasi dan Staf		122	Unit		
8.	Meja Rapat		3	Buah		
9.	Meja Laboratorium		4	Buah		
10.	Meubelair Ruang Pimpinan		1	Buah		
11.	Meja, Kursi Ruang Tamu		3	Set		
12.	Kursi Lipat		437	Buah		
13.	Kursi Rapat		12	Buah		
14.	Filling Kabinet		17	Buah		
15.	Lemari Arsip Besi 2 Pintu		38	Buah		
16.	Rak Arsip		9	Buah		
17.	Tiang Bendera		1	Buah		
18.	Kipas Angin		5	Buah		
19.	White Board		4	Buah		
20.	Papan Pengumuman		2	Buah		
III	Peralatan Gedung Kantor					
1.	AC Ruang Pimpinan		3	Unit		1 rusak
2.	AC di ruang Tata Usaha		6	Unit		3 rusak
3.	AC di ruang Tamu		1	Unit		

4.	AC di ruang-ruang lainnya		9	Unit		
5.	Genset		-			
6.	Kulkas		1	Buah		
7.	Mesin Pemotong Rumput Gendong		22	Buah		
8.	Sound Sistem		4	Unit		
IV	Peralatan & Perlengkapan Kantor					
1.	Komputer / PC		12	Unit		
2.	Note Book		11	Buah		
3.	Printer		16	Buah		
4.	LCD Projektor		3	Unit		1 rusak
5.	Wireless		2	Unit		
6.	GPS		2	Buah		
7.	Telepon		2	Unit		
8.	Kamera		1	Buah		
9.	Handycam		6	Buah		
V	Kendaraan Dinas / Operasional					
1.	Kendaraan Roda Empat		7	Unit		
2.	Kendaraan Roda Dua		8	Unit		
3.	Kendaraan Roda Enam (Truck)		12	Unit		
4.	Kendaraan Roda Sepuluh		1	Unit		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna untuk melihat perkembangan yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan melihat kecenderungan yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Dengan mengetahui trend tersebut, akan mempermudah melakukan perencanaan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Adapun tabel capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Kelancaran informasi, komunikasi dan pelayanan publik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,6	-	-	0,14	0,18	0,21	0,24	0,27	0,14	0,10	0,20	0,45	0,45	97,58	54,78	95,24	185,73	166,67
3.	Rasio Jaringan Irigasi	0,7	-	-	0,57	0,62	0,67	0,73	0,79	0,8	0,84	0,86	0,75	0,70	153,85	135,75	128,36	102,74	88,61
4.	Luas Wilayah Kebanjiran	50	-	-	17,96%	17,07%	16,21%	15,40%	14,63%	20,16%	19,43%	18,77%	17,18%	14%	112,25	113,80	115,79	111,56%	95,69
5.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	-	93,82%	94,81%	95,79%	96,78%	97,79%	60,76%	68,91%	72,81%	75,49%	77,96%	64,76	72,68	76,01	78	79,73
6.	Rasio rumah layak huni	-	-	-	0,6	0,61	0,63	0,64	0,65	0,97	0,96	0,95	0,64	0,65	161,58	157,12	150,79	100	100
7.	Rasio permukiman layak huni	-	-	-	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Persentase penanganan sampah	70	-	-	65,54%	67,54%	68,53%	72,61%	75,81%	65%	63%	13,58%	13,33%	46,39%	99,11	93,58	19,82	18,36	61,19
9.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,2	-	-	2,32	4,2	5,2	6,2	7,5	0,53	0,72	1,02	2,2	7,5	22,87	17,05	19,62	35,48	100
10.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	-	-	-	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1	-	-	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,04	0,06	0,1	0,08	0,096	70,36	70,22	71,98	66,67	68,57
11.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,25	-	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun -					Realisasi Anggaran pada Tahun -					Rasio Realisasi Anggaran Tahun -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Belanja Tidak Langsung	5,645	5,964	5,326	5,914	6,909	5,478	5,728	5,882	5,773	6,714	97,04	96,44	97,30	97,63	97,18	5,95	5,92
2 Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	4,607	5,879	7,416	8,561	10,511	4,453	5,664	6,853	8,136	10,315	96,64	96,35	92,40	95,02	98,13	7,39	7,08
- Belanja Barang/Jasa	15,085	23,276	40,364	29,657	32,070	14,367	21,871	39,374	29,041	31,678	95,24	93,96	97,54	97,92	98,78	28,09	27,27
- Belanja Modal	156,123	298,661	301,858	204,273	259,146	149,199	266,100	301,375	203,265	258,055	95,56	89,09	99,83	99,50	99,58	244,01	235,60

- *) Anggaran Rp dalam Milyar
 *) Rasio dalam % (Persentase)

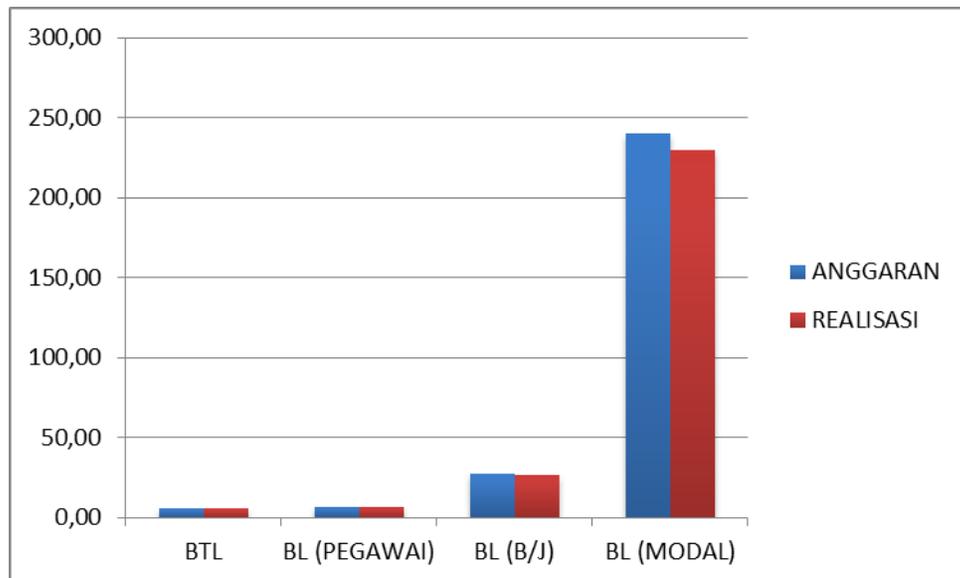


Diagram 2.1. Tingkat Realisasi Anggaran Program SKPD

Pencapaian program strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebagaimana digambarkan pada diagram di atas. Pencapaian program strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat juga dapat dilihat dari hasil pembangunan infrastruktur yang telah ada hingga saat ini, antara lain :

1. Pembangunan infrastruktur dalam bidang kebinamargaan, terutama pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan yang menghubungkan antar daerah dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan ini diprogramkan untuk ditingkatkan pada tiap tahun anggaran, sehingga diharapkan dapat menunjang kelancaran aksesibilitas dan pada tujuan akhirnya dapat pula meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat.
2. Peningkatan fasilitas – fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penyehatan lingkungan, seperti pengadaan perpipaan untuk distribusi air minum, pengolahan air limbah, pembuatan saluran drainase dan gorong-gorong.
3. Peningkatan pengembangan sumber daya air guna menunjang kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, normalisasi sungai dan kegiatan pengairan lainnya yang telah tersebar di beberapa desa dan kecamatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut beberapa poin tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kedepannya:

Tabel 2.4.
Matrik Tantangan dan Peluang

TANTANGAN	1. Masih perlu peningkatan kualitas pelayanan kinerja aparatur
	2. Kurangnya ketersediaan sistem informasi ke-PU-an
	3. Ketersediaan alat berat dan alat-alat laboratorium
	4. Belum semua desa terhubung akses jalan darat
	5. Rendahnya layanan infrastruktur jalan dan jembatan desa-kota
	6. Lambannya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan
	7. Rendahnya konektivitas antar wilayah terutama ringroad dalam kota dan luar kota
	8. Rendahnya kualitas layanan kota-desa
	9. Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik
	10. Rendahnya daya dukung jalan menuju pelabuhan maupun kota dan desa
	11. Belum optimalnya estetika infrastruktur perkotaan
	12. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota
	13. Belum semua masyarakat terlayani air bersih.
	14. Belum maksimalnya penanganan penyehatan lingkungan permukiman (PLP)
	15. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat
	16. Belum tersedianya dokumen rencana penataan ruang
	17. Belum adanya regulasi pemanfaatan ruang di daerah
	18. Kurangnya Informasi tentang penataan ruang
	19. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang
	20. Kurang terwujudnya pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan
	21. Kurangnya sumber air baku untuk masyarakat
	22. Berkurangnya fungsi sungai yang mengakibatkan resiko daya rusak air
	23. Terjadinya erosi dan abrasi pantai
	24. Terjadinya genangan air dan banjir
	25. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi daerah
PELUANG	1. Pengembangan infrastruktur merupakan Arah kebijakan nasional
	2. Kepatuhan terhadap tata ruang
	3. Ketersediaan alat berat dan alat-alat laboratorium
	4. Adanya upaya terhadap pengendalian banjir

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing daerah. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk rawa) disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan permukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat ialah: bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan) serta memberikan dampak positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Isu ini semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan serius dan sudah pasti apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang.

Sejalan dengan adanya fenomena perubahan iklim (*climate change*), pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga dihadapkan dengan tantangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (antara lain CO₂ dan CH₄), meningkatkan penyerapan karbon oleh hutan tropis, dan meningkatnya harga pangan dunia. Dalam mengantisipasi dampak akibat perubahan iklim, dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi sektor ke-PU-an terutama terkait dengan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk menyokong produksi pangan dan respon terhadap pengelolaan infrastruktur dalam mengantisipasi bencana yang terkait dengan perubahan iklim seperti penurunan ketersediaan air, banjir, kekeringan, tanah longsor, dan intrusi air laut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang layaknya instansi atau satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Masih perlu peningkatan kualitas pelayanan kinerja aparatur
2. Kurangnya ketersediaan sistem informasi ke-PU-an
3. Ketersediaan alat berat dan alat-alat laboratorium
4. Belum semua desa terhubung akses jalan darat
5. Rendahnya layanan infrastruktur jalan dan jembatan desa-kota
6. Lambannya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan
7. Rendahnya konektivitas antar wilayah terutama ringroad dalam kota dan luar kota
8. Rendahnya kualitas layanan kota-desa
9. Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik
10. Rendahnya daya dukung jalan menuju pelabuhan maupun kota dan desa
11. Belum optimalnya estetika infrastruktur perkotaan
12. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota
13. Belum semua masyarakat terlayani air bersih
14. Belum maksimalnya penanganan penyehatan lingkungan permukiman (PLP)
15. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat
16. Belum tersedianya dokumen rencana penataan ruang
17. Belum adanya regulasi pemanfaatan ruang di daerah
18. Kurangnya Informasi tentang penataan ruang
19. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang

20. Kurang terwujudnya pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan
21. Kurangnya sumber air baku untuk masyarakat
22. Berkurangnya fungsi sungai yang mengakibatkan resiko daya rusak air
23. Terjadinya erosi dan abrasi pantai
24. Terjadinya genangan air dan banjir
25. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana diketahui bahwa visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Relevansi tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap visi dan misi tersebut di atas adalah pada **misi ketiga yaitu Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup**. Selama lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Percepatan pembangunan infrastruktur ke depan akan diarahkan sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;
2. Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi guna pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
3. Pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;
4. Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;
5. Pembukaan jalan kecamatan arut utara ke kabupaten;
6. Pembangunan jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;
7. Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;

8. Pembangunan Water Front City;
9. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;
10. Pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;
11. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai peruntukannya;
12. Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;
13. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
14. Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;
15. Penyiapan konservasi air dan penyediaan air baku;
16. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yg komprehensif untukantisipasi banjir dan kekeringan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai *multiplier* ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman.

Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic goals*, yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) meningkatkan kualitas lingkungan.

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (ii) Infrastruktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan.

Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (*economic gains*), menghadirkan keuntungan sosial (*social benefits*), meningkatkan layanan publik (*public services*), serta meningkatkan partisipasi politik (*political participation*) di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Surat Edaran Bupati tentang Arahan Standar Pelayanan Minimal, terdapat jenis pelayanan dasar dan indikatornya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014 dengan jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Sumber Daya Air.
Indikator :
 - a. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
 - b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
2. Jalan.
Indikator :
 - a. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.
 - b. Persentasi terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota.
3. Air Minum.
Indikator :
 - a. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
4. Sanitasi.
Indikator :
 - a. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai.
 - b. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun.
5. Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan
Indikator :
 - a. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
6. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi
Indikator :
 - a. Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
7. Penataan Ruang.
Indikator :

- a. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Penyelarasan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antar daerah dan antar tingkatan RTRW.

Dalam Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, dijelaskan mengenai Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Sistem Utilitas. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi meliputi Jaringan jalan yang terdiri atas :

- a. Jaringan Jalan Arteri Primer :
 1. Peningkatan Jalan Negara Pangkalan Bun ke Amin jaya - kabupaten Seruyan
- b. Pembangunan Jalan Arteri Sekunder :
 1. Pembangunan jalan ke Pangkalan Bun- Kotawaringin Lama
 2. Peningkatan jalan Pangkalan Bun – Kumpai Batu – Tanjung Putri
 3. Peningkatan jalan Pangkalan Bun – Kumai – Kubu- Teluk Bogam – Tanjung Putri- Perbatasan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 4. Pembangunan jalan Pangkut – Rantau Pulut
 5. Pembangunan jalan Pangkut – Aspek Paper – Nangabulik
 6. Jalan Angkutan khusus (pertambangan, perkebunan dan kehutanan): 1) Nanga Mua – Semanggang- pabrik Pulp; 2) Rangda – Sungai Rangit jaya – P. BumiHarjo; 3) rantau Pulut/Seruyan – Semanggang – S. Rangit Jaya- P. Bumi Harjo
- c. Pembangunan jalan kolektor primer :
 1. Pembangunan jalan Pangkut – Runtu – Sulung Kenambui – Rangda – Lalang – Kotawaringin
 2. Rangda – Medang Sari – Simpang Runtu
 3. Purbasari – Pelabuhan Roro – Kumai
 4. Pangkalan Banteng – Sungai Bedaun – Kumai Sebrang
 5. Sp. Kotawaringin lama/P.bun – Simpang Runtu
 6. Pembangunan jalan Palih Baru – Kondang – Rungun – Lalang.

Adapun Sistem Utilitas berupa penyediaan jaringan distribusi air bersih di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Fokus pembangunan ini ditujukan pada upaya agar rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan utama di dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, serta mewujudkan keterpaduan

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang. Upaya ini disertai dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap isu-isu lingkungan termasuk pemanasan global. Infrastruktur dapat mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan namun sebaliknya jika infrastruktur dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka infrastruktur dapat menyelamatkan lingkungan dan mengurangi fatalitas akibat bencana.

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat ini pun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum. Infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan tersebut harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut di antaranya adalah menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (*green building* dan *green infrastructure*), mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan, mewujudkan *ecocity*, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berwawasan lingkungan tersebut sepenuhnya perlu didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan yang berwawasan atau ramah lingkungan. Untuk itu, dalam pengembangan teknologi, rancangan dan arsitektur bangunan, metodologi pembangunan, material dan bahan yang dimanfaatkan, serta efisiensi penggunaan sosial dan sumber daya air, termasuk prinsip-prinsip dasar 3R: *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (mengggunakan kembali), dan *Recycling* (mendaur ulang) dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus menjadi komitmen seluruh pelaku pembangunan bidang ke-PU-an.

Adapun dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terdapat beberapa rekomendasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas rumusan perencanaan pembangunan kedepan yaitu :

1. Penerapan stop buang air besar sembarangan, tentunya dengan peningkatan layanan fasilitas umum/komunal (MCK);
2. Program pembangunan jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas wilayah, meningkatkan dinamisasi perekonomian wilayah dengan memperhatikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan hidup;
3. Program rehabilitasi jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas wialyah, meningkatkan dinamisasi perekonomian wilayah dengan memperhatikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hasil telaahan di atas maka dapat dijabarkan yang menjadi isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum adalah terkait hal-hal berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kinerja aparatur dinas;
2. Kurangnya penerapan sistem informasi dan teknologi;
3. Minimnya ketersediaan alat berat dan alat-alat laboratorium;
4. Konektivitas antar wilayah di kabupaten yang belum optimal;
5. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan di kabupaten;
6. Kurangnya estetika infrastruktur perkotaan;
7. Kurangnya ketersediaan sanitasi permukiman dan air bersih perdesaan;
8. Minimnya ketersediaan dokumen penataan ruang;
9. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap tata ruang;
10. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan irigasi;
11. Kurangnya ketersediaan sumber air baku;
12. Belum optimalnya fungsi sungai;
13. Belum optimalnya fungsi pantai;
14. Belum optimalnya upaya pengendalian banjir; dan
15. Masih lemahnya pembinaan jasa konstruksi daerah.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN**

Pembangunan bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar agar dapat menjamin keberlangsungan fungsi masyarakat atau rumah tangga, maupun dunia usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, dan mewujudkan keadilan. Adapun linearitas sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran SKPD dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Linearitas Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran SKPD

MISI	SASARAN RPJMD	TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD
Misi 1: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Sasaran 2: Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pemerintah	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketercukupan administrasi perkantoran - Persentase ketercukupan sarana dan prasarana apratur - Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja - Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan - Persentase pencapaian retribusi kekayaan daerah

MISI	SASARAN RPJMD	TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD
		Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi daerah	Meningkatnya informasi jasa konstruksi dilakukan secara aktif dan berkala melalui SIPJAKI	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada SIPJAKI
Misi 3: Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup	Sasaran 13: Meningkatnya pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Meningkatkan kualitas layanan kota-desa	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang
			Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di kabupaten
		Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai - Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala

MISI	SASARAN RPJMD	TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD
				kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)
			Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan
Misi 3: Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup	Sasaran 13: Meningkatnya pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk mendukung pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangannya
		Meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air baku	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
		Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir

			Meningkatnya upaya pengamanan pantai	Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai
		Menyediakan informasi tata ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci Tata Ruang kabupaten/Kota

Tabel 4.2.
Indikator Sasaran dan Target Capaian Indikator Sasaran SKPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Baseline Perencanaan (2017)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja aparatur	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase ketercukupan sarana dan prasarana apratur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase pencapaian retribusi kekayaan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Baseline Perencanaan (2017)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
2.	Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi daerah	Meningkatnya informasi jasa konstruksi dilakukan secara aktif dan berkala melalui SIPJAKI	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada SIPJAKI	0,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00
3.	Meningkatkan kualitas layanan kota-desa	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	77,57	78,34	79,13	79,92	80,72	81,52
		Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di kabupaten	77,46	83,10	88,73	94,37	100,00	100,00
4.	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	77,00	79,00	82,00	90,00	95,00	100,00
			Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Baseline Perencanaan (2017)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
			Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	75,00	77,00	80,00	82,00	84,00	85,00
		Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan	72,60	76,90	81,20	100,00	100,00	100,00
5.	Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk mendukung pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangannya	25,00	33,00	35,00	40,00	45,00	50,00

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Baseline Perencanaan (2017)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
6.	Meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air baku	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	18,00	19,00	20,00	22,00	24,00	26,00
7.	Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	25,00
		Meningkatnya upaya pengamanan pantai	Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	40,00	45,00	47,00	50,00	52,00	55,00
8.	Menyediakan informasi tata ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/Kota	N/A	16,67	33,33	50,00	66,67	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017-2022 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal SKPD (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal SKPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa penentuan beberapa alternatif strategi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Tabel. 5.1.
Matrik Analisis SWOT

	KEKUATAN (Strength)	KELEMAHAN (Weakness)
ISU STRATEGIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan alat berat dan alat-alat laboratorium ▪ Upaya pengendalian banjir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas dan kinerja aparatur dinas ▪ Penerapan sistem informasi dan teknologi ▪ Konektivitas antar wilayah di kabupaten ▪ Kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan di kabupaten ▪ Estetika infrastruktur perkotaan ▪ Ketersediaan sanitasi permukiman dan air bersih perdesaan ▪ Ketersediaan dokumen penataan ruang ▪ Pengelolaan dan pengembangan irigasi ▪ Ketersediaan sumber air baku ▪ Pembinaan jasa konstruksi daerah

<p style="text-align: center;">PELUANG (Opportunities)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang ▪ Pengembangan infrastruktur merupakan Arah kebijakan nasional 	<p style="text-align: center;">Mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pengembangan penerapan sistem teknologi dan informasi ➤ Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah di kabupaten guna pengembangan industri dan peningkatan ekonomi masyarakat ➤ Pengembangan konsep water front city dalam mendukung pengembangan perekonomian dan pariwisata ➤ Meningkatkan pembangunan infrastruktur keciptakarya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, infrastruktur permukiman dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (Threat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi alam (cuaca/iklim) ▪ Kuantitas & Kualitas Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Jasa Konstruksi 	<p style="text-align: center;">Mengoptimalkan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk pengendalian banjir dan abrasi pantai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan ➤ Meningkatkan kapasitas dan mengendalikan kualitas konstruksi

Berdasarkan kajian penentuan alternatif strategi maka dapat diketahui strategi dan arah kebijakan kedepan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Matrik Balance Score Card

NO.	PRESPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Perspektif Masyarakat	Mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang	Mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang	Pengoptimalan perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang
		Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah di kabupaten guna pengembangan industri dan peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah di kabupaten sehingga berdampak positif terhadap pengembangan industri dan peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan yang strategis, modern & canggih untuk mendukung konektivitas wilayah di kabupaten
		Pengembangan konsep water front city dalam mendukung pengembangan perekonomian dan pariwisata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur keciptakarya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (water front city dan kawasan kuliner) sehingga mendukung kemandirian perekonomian masyarakat dan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi ➤ Percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan water front city
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur keciptakarya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, infrastruktur permukiman dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh	Meningkatkan pembangunan infrastruktur keciptakarya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (water front city dan kawasan kuliner) sehingga mendukung kemandirian perekonomian masyarakat dan kepariwisataan	
		Mengoptimalkan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk pengendalian banjir dan abrasi pantai	Mengoptimalkan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk pengendalian banjir dan abrasi pantai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengoptimalan pengendalian banjir ➤ Pengamanan pantai dari abrasi pantai

NO.	PRESPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan	Penyelenggaraan pembangunan untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan
		Meningkatkan kapasitas dan mengendalikan kualitas konstruksi	Meningkatkan kapasitas dan mengendalikan kualitas konstruksi	Peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi
2.	Perspektif proses Internal	Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pengembangan penerapan sistem teknologi dan informasi	Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pengembangan penerapan sistem teknologi dan informasi	Peningkatan penerapan sistem teknologi dan informasi
3.	Perspektif Kelembagaan	-	-	-
4.	Perspektif Keuangan	-	-	-

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan akan dapat mendukung pencapaian visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Adapun relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD 2017-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 5.3.
Matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

VISI	: GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS			
MISI 1	: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja aparatur	Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pengembangan penerapan sistem teknologi dan informasi	Peningkatan penerapan sistem teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Peningkatan disiplin aparatur - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi daerah	Meningkatnya informasi jasa konstruksi dilakukan secara aktif dan berkala melalui SIPJAKI	Meningkatkan kapasitas dan mengendalikan kualitas konstruksi	Peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi	Pembinaan konstruksi

MISI 3	: Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan kualitas layanan kota-desa	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten 	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas wilayah di kabupaten sehingga berdampak positif terhadap pengembangan industri dan peningkatan ekonomi masyarakat	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan yang strategis, modern & canggih untuk mendukung konektivitas wilayah di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan 	Meningkatkan pembangunan infrastruktur keciptakarya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (water front city dan kawasan kuliner) sehingga mendukung kemandirian perekonomian masyarakat dan kepariwisataan	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
			2. Percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan <i>Water Front City</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Infrastruktur Permukiman - Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Mewujudkan pengelolaan & pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan	Penyelenggaraan pembangunan untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan	- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air baku	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat			- Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air	Mengoptimalkan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk pengendalian banjir dan abrasi pantai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan pengendalian banjir 2. Pengamanan pantai dari abrasi pantai 	Pengendalian banjir
Menyediakan informasi tata ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang	Pengoptimalan perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang direncanakan pada tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu pada program kerja Bupati tahun 2017-2022 yaitu:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu dari desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;
2. Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi untuk pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
3. Pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;
4. Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama;
5. Pembukaan jalan kecamatan Arut Utara ke kabupaten;
6. Pembangunan Water Front City;
7. Pembangunan jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;
8. Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;
9. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;
10. Pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;
11. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai peruntukannya;
12. Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat-tepat penanganannya;
13. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
14. Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;
15. Penyediaan konservasi air dan penyediaan air baku;
16. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang komprehensif untuk antisipasi banjir dan kekeringan.

Guna mewujudkan program kerja tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merencanakan beberapa pekerjaan berikut ini untuk dapat dilaksanakan selama periode Renstra 2017-2022, meliputi:

1. Pembuatan aplikasi sistem informasi ke-PU-an;
2. Pembuatan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten;
3. Penuntasan pembangunan jalan pangkalan bun-kolam
4. Pembukaan jalan kecamatan arut utara ke kabupaten
5. Peningkatan jalan Umpang-Nanga Mua, Umpang-Pandu Sanjaya, jalan Kumai-Kubu-Teluk Bogam-Keraya-Sebuai-Tanjung Putri, peningkatan jalan Lalang Danau Gatal, jalan Rungun-Kondang-Batas Lamandau, Jembatan di Arut Utara, Umpang, Kumai, Jembatan *Cable Stayed*;
6. Pembangunan *ringroad* Sungai Tendang-Pangkalan Satu-Bumi Harjo-Natai Baru-Kadipi Atas-Makarti Jaya, pembangunan *ringroad* Pandu Sanjaya-Lada Mandala Jaya-Sungai Melawen, pembangunan *ringroad* Kebun Agung-Sungai Pakit-Simpang Amin

- Jaya, pembangunan *ringroad* jalan KM 53-Sungai Bengkoang-Sidomulyo-Sungai Kuning, pembangunan *ringroad* Medang sari KM 18;
7. Pembangunan dan peningkatan jalan di lingkungan permukiman di 6 kecamatan;
 8. Pembangunan Water Front City, penataan Pangkalan Bun Park, penataan kawasan Sport Center, kawasan kuliner/UMKM;
 9. Irigasi Kumpai Batu Atas-Terantang (APBN), Irigasi Berambai Makmur, irigasi Marga Mulya, irigasi Pangkalan Banteng, irigasi Pangkalan Satu Lahan 1, Lahan 2, irigasi Sebuai, irigasi Sakalading, irigasi Teluk Pulau, irigasi Kapitan (Kelapa Tindan) Kotawaringin Hilir, Kotawaringin Hulu, irigasi Kumai Kondang, Palih Baru;
 10. Embung Danau Gatal (APBN), embung Sungai Pulau (APBN), embung Sungai Asam (APBN), embung Sungai Hijau (APBN), Danau Masorayan, embung Desa Umpang, embung Marga Mulya, embung Karang Sari, embung Sungai Rangit Jaya (Lokasi 1, Lokasi 2), embung Amin Jaya (Lokasi 1, 2), embung Riam Durian, embung Lada Mandala Jaya, embung Sungai Kuning, embung Sungai Tendang;
 11. Normalisasi Sungai Karang Anyar, Sungai Bamban, Sungai Kakap, Sungai Pakit, Sungai Biru, Sungai Anak Sungai Pakit, Sungai Karang Mulya, Sungai Karang Sari, Sungai Buun, Sungai Hijau, Lopo, Sungai Teluk Kamat, Sungai Asam, Sungai Seluluk, penanganan banjir di Kumai Hulu, Kumai Hilir, Kawasan Makam Pahlawan, Kawasan Mendawai (Teratai);
 12. Penanganan abrasi pantai di Kubu, Keraya, Sungai Cabang, Sebuai Timur.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan disajikan sebagaimana termuat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
						Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)						
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja aparatur			IK Tujuan: Indeks Kepuasan Aparatur IK Sasaran: Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	100%	Target 100%	Rp	Target 100%	Rp (juta)											
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.758.471.600	100%	3.067.579.600	100%	4.601.369.400	100%	6.541.366.500	100%	9.312.049.050	100%	10.243.253.900	100%	37.524.090.050	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bln	12 bln	303.000.000	12 bln	488.222.500	12 bln	732.333.750	12 bln	1.098.500.650	12 bln	1.647.750.000	12 bln	1.812.525.000	12 bln	6.082.331.900	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	43 unit	61 unit	37.647.000	48 unit	30.463.250	48 unit	45.694.875	48 unit	68.542.300	48 unit	102.814.000	48 unit	113.095.400	48 unit	398.256.825	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bln	12 bln	1.484.664.100	12 bln	1.304.606.600	12 bln	1.956.909.900	12 bln	2.935.364.850	12 bln	4.403.047.000	12 bln	4.843.351.700	12 bln	16.927.944.150	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	5.535.000	12 bln	8.500.350	12 bln	12.750.525	12 bln	19.125.700	12 bln	28.688.550	12 bln	31.557.400	12 bln	106.157.525	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Output : Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4 jenis	4 jenis	28.250.000	4 jenis	31.250.000	4 jenis	46.875.000	4 jenis	70.312.500	4 jenis	105.468.750	4 jenis	116.015.600	4 jenis	398.171.850	
			Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	67 jenis	40 jenis	166.941.500	40 jenis	184.375.900	40 jenis	276.563.850	40 jenis	414.845.750	40 jenis	622.268.600	40 jenis	684.495.400	40 jenis	2.349.491.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output: Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan	6 jenis 150.000 lbr	6 jenis 150.000 lbr	56.250.000	6 jenis 150.000 lbr	59.022.000	6 jenis 150.000 lbr	88.533.000	6 jenis 150.000 lbr	132.799.500	6 jenis 150.000 lbr	199.199.250	6 jenis 150.000 lbr	219.119.200	6 jenis 150.000 lbr	754.922.950	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	46 buah	101 buah	3.870.000	101 buah	4.408.000	101 buah	6.612.000	101 buah	9.918.000	101 buah	14.877.000	101 buah	16.364.700	101 buah	56.049.700	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	43 unit	43 unit	528.469.000	25 unit	351.981.000	35 unit	527.971.500	35 unit	791.957.250	35 unit	1.187.935.900	35 unit	1.306.729.500	208 unit	4.695.044.150	
			Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	93 org	93 org	438.845.000										93 org	438.845.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : Waktu Pelaksanaan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln	12 bln	705.000.000	12 bln	604.750.000	12 bln	907.125.000	12 bln	1.000.000.000	12 bln	1.000.000.000	12 bln	1.100.000.000	12 bln	5.316.875.000	

				IK Tujuan: Indeks Kepuasan Aparatur IK Sasaran: Persentase ketercukupan sarana dan prasarana apratur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	848.365.000	100%	362.995.000	100%	920.692.500	100%	1.511.983.000	100%	1.816.174.500	100%	1.912.991.950	100%	7.373.201.950
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	11 unit	6 unit	106.540.000	2 unit	47.200.000	17 unit	300.000.000	2 unit	47.200.000	10 unit	120.000.000	2 unit	47.200.000	39 unit	668.140.000
			Pengadaan mebeleur	Output : Jumlah mebeleur yang diadakan	-	55 buah	63.025.000	30 buah	26.348.000	30 buah	39.522.000	30 buah	59.283.000	30 buah	88.924.500	30 buah	97.816.950	205 buah	374.919.450
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	2 unit	284.800.000	1 unit	-	1 unit	147.000.000	1 unit	220.500.000	1 unit	330.750.000	1 unit	363.825.000	1 unit	1.346.875.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	8 unit	8 unit	88.000.000	8 unit	76.000.000	8 unit	114.000.000	8 unit	171.000.000	8 unit	256.500.000	8 unit	282.150.000	8 unit	987.650.000
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	-	-	2 jenis	5.000.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	32.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	2 jenis	6.000.000	2 jenis	6.000.000	2 jenis	4.000.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	12.000.000	2 jenis	45.000.000
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Output : Rehabilitasi : - Gedung kantor - Pagar - Taman		3 paket	300.000.000	3 paket	207.447.000	2 paket	311.170.500	2 paket	1.000.000.000	2 paket	1.000.000.000	2 paket	1.100.000.000	3 paket	3.918.617.500
				IK Tujuan: Indeks Kepuasan Aparatur IK Sasaran: Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	92.733.300	100%	218.500.000	100%	305.250.000	100%	457.875.000	100%	686.812.500	100%	755.493.800	100%	2.516.664.600
			Pengadaan mesin/kartu absensi	Output : Mesin Absensi	-	-	-	2 unit	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	15.000.000
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output : Jumlah pakaian dinas	184 stel	195 Stel	92.733.300	195 stel	101.750.000	195 stel	152.625.000	195 stel	228.937.500	195 stel	343.406.250	195 stel	377.746.900	195 stel	1.297.198.950
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Output : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	195 stel	101.750.000	195 stel	152.625.000	195 stel	228.937.500	195 stel	343.406.250	195 stel	377.746.900	195 stel	1.204.465.650
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	20%	25%	195.000.000	30%	228.000.000	40%	342.000.000	50%	513.000.000	60%	769.500.000	70%	846.450.000	70%	2.893.950.000
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output : Waktu bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	195.000.000	12 bulan	228.000.000	12 bulan	342.000.000	12 bulan	513.000.000	12 bulan	769.500.000	12 bulan	846.450.000	12 bulan	2.893.950.000

			IK Tujuan: Indeks Kepuasan Aparatur IK Sasaran: Persentase pemuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	3.037.500	75%	4.380.000	80%	6.570.000	85%	9.855.000	90%	14.782.500	100%	22.173.750	100%	60.798.750
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	2 laporan	637.500	2 laporan	1.460.000	2 laporan	2.190.000	2 laporan	3.285.000	2 laporan	4.927.500	2 laporan	7.391.250	2 laporan	19.891.250
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Output : Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	1.200.000	2 laporan	1.460.000	2 laporan	2.190.000	2 laporan	3.285.000	2 laporan	4.927.500	2 laporan	7.391.250	2 laporan	20.453.750
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.460.000	1 laporan	2.190.000	1 laporan	3.285.000	1 laporan	4.927.500	1 laporan	7.391.250	1 laporan	20.453.750
			IK Tujuan: Indeks Kepuasan Aparatur IK Sasaran: Persentase pencapaian retribusi kekayaan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	100%	100%	1.202.714.800	100%	1.365.500.000	100%	4.968.633.000	100%	4.866.828.576	100%	3.933.216.437	100%	4.432.814.468	100%	20.769.707.281
		Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Output : Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang diadakan	7 jenis	8 jenis	359.260.400	15 jenis	409.137.000	15 jenis	787.675.000	16 jenis	918.881.000	16 jenis	1.094.695.000	20 jenis	1.692.688.500	20 jenis	5.262.336.900
		Pengadaan alat-alat berat	Output : Jumlah alat berat	-	-	-	-	-	1 unit	3.390.990.000	1 unit	3.100.022.576	1 unit	1.930.493.437	1 unit	1.869.264.968	1 unit	10.290.770.981
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Output : Jumlah pemeliharaan alat berat	14 unit	14 unit	819.936.400	21 unit	933.160.000	21 unit	760.500.000	21 unit	810.500.000	21 unit	860.500.000	21 unit	810.500.000	21 unit	4.995.096.400
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Output : Jumlah pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium	11 Unit	11 Unit	23.518.000	8 jenis	23.203.000	8 jenis	29.468.000	10 jenis	37.425.000	10 jenis	47.528.000	12 jenis	60.361.000	12 jenis	221.503.000
Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi daerah	Meningkatnya informasi jasa konstruksi dilakukan secara aktif dan berkala melalui SIPJAKI		IK Tujuan&Sasaran: Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada SIPJAKI	-	-	-	60%	-	70%	-	75%	-	80%	-	85%	-	-	
		Pembinaan konstruksi	Persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi			-	100%	1.364.175.000	100%	3.064.285.000	100%	3.586.146.000	100%	4.283.336.000	100%	4.729.001.000	100%	17.026.943.000

		Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota	Output: jumlah data /informasi sistem aplikasi data				2 dok 1 sistem aplikasi	496.000.000	1 dok 1 sistem aplikasi	850.285.000	1 dok 1 sistem aplikasi	1.075.146.000	1 dok 1 sistem aplikasi	1.275.336.000	1 dok 1 sistem aplikasi	1.475.001.000	2 dok 1 sistem aplikasi	5.171.768.000
			Jumlah kegiatan (sosialisasi/forum/rapat teknis)				1 keg		3 keg		3 keg		3 keg		3 keg		3 keg	
		Peningkatan kapasitas badan usaha	Output: jumlah peserta bimtek PJTBU						25 orang	188.000.000			25 orang	200.000.000			25 orang	388.000.000
		Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Output: jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi keterampilan konstruksi				120 orang	625.280.000	160 orang	1.250.000.000	160 orang	1.600.000.000	160 orang	1.900.000.000	160 orang	2.300.000.000	160 orang	7.675.280.000
			Database tenaga kerja konstruksi				1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
		pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Output: Jumlah dokumen (Standar, Prosedur, Kriteria, Naskah Akademik)				1 Dok	242.895.000	2 Dok	776.000.000	2 Dok	911.000.000	2 Dok	908.000.000	2 Dok	954.000.000	2 Dok	3.791.895.000
			Jumlah peserta kegiatan Bimtek penyelenggaraan konstruksi				30 org		90 org		90 org		90 org		90 org		90 org	
Meningkatkan kualitas layanan kota-desa	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten		IK Tujuan& Sasaran: Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	76,80%	77,57%		78,34%		79,13%		79,92%		80,72%		81,52%		81,52%	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	939,82 Km	945 Km	5.728.191.350	950 Km	7.272.044.400	955 Km	6.200.000.000	960 Km	6.200.000.000	965 Km	6.200.000.000	970 Km	6.200.000.000	970 Km	37.800.235.750
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Output: Panjang ruas jalan yang direhabilitasi	200 Km	200 Km	5.105.369.350	200 Km	6.642.044.400	200 Km	5.000.000.000	1.200 Km	31.747.413.750						
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Output: Jumlah jembatan yang dipelihara	24 Buah	24 Buah	622.822.000	12 Buah	630.000.000	20 Buah	1.200.000.000	21 Buah	1.200.000.000	19 Buah	1.200.000.000	19 Buah	1.200.000.000	24 Buah	6.052.822.000
	Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten		IK Tujuan& Sasaran: Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di kabupaten	71,83%	77,46%		83,10%		88,73%		94,37%		100%		100%		100%	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	71,83%	77,46%	171.244.310.650	83,10%	49.084.605.600	88,73%	177.804.664.100	94,37%	209.262.389.500	100%	251.250.960.450	100%	278.092.878.100	100%	1.136.739.808.400
		Pembangunan Jalan	Output: Panjang pembangunan jalan	40 Km	5 Km	9.071.986.450	5 Km	11.886.037.000	8 Km	16.407.046.000	10 Km	21.000.000.000	5 Km	30.350.154.000	5 Km	35.090.054.000	38 Km	123.805.277.450
		Pembangunan Jembatan	Output: Jumlah pembangunan jembatan	13 buah	13 buah	13.321.177.000	13 buah	14.675.694.800	13 buah	75.000.000.000	13 buah	87.518.719.000	15 buah	80.000.000.000	16 buah	82.000.000.000	83 buah	352.515.590.800
		Peningkatan Jalan	Output: Panjang peningkatan jalan kabupaten	42 Km	42 Km	112.757.782.500	13 Km	22.522.873.800	21 Km	86.347.618.100	25 Km	100.693.670.500	35 Km	140.850.806.450	40 Km	160.952.824.100	176 Km	624.125.575.450
		Peningkatan jalan lingkungan	Output: Panjang peningkatan jalan lingkungan	17 Km	20 Km	36.093.364.700												36.093.364.700

			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Waktu Monitoring, evaluasi dan pelaporan						12 bulan	50.000.000	12 bulan	200.000.000								
			Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan informasi/database jalan dan jembatan	6 Kec.	6 Kec.	194.727.500	6 Kec.	200.000.000	6 Kec.	1.200.000.000	6 Kec.	400.000.000	6 Kec.	2.794.727.500						
			Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan	Output : Jumlah dokumen database jalan	1 Dok	1 Dok	99.165.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	600.000.000	1 Dok	200.000.000	6 Dok	1.399.165.000						
			Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jembatan	Output : Jumlah dokumen database jembatan	1 Dok	1 Dok	95.562.500	1 Dok	100.000.000	1 Dok	600.000.000	1 Dok	200.000.000	6 Dok	1.395.562.500						
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman			IK Tujuan& Sasaran: Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	74,70%	77%		79%		82%		90%		95%		100%		100%			
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah penduduk terlayani air minum	207.888 jiwa	208.469 jiwa	10.162.398.800	219.231 jiwa	12.259.683.000	219.240 jiwa	5.311.425.800	219.248 jiwa	6.215.985.300	219.257 jiwa	7.424.448.900	219.268 jiwa	8.196.934.900	219.268 jiwa	8.196.934.900	219.268 jiwa	49.570.876.700
				Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komuna/ SPAL terpusat	53.475 KK	57.532 KK		62.439 KK		63.649 KK		64.643 KK		64.643 KK		64.643 KK		64.643 KK		64.643 KK	
			Pengembangan distribusi air minum	Output : Jaringan air minum yang dibangun	6 unit	10 unit	6.083.948.800	2 unit	1.177.359.000	7 unit	1.062.285.160	8 unit	1.243.197.060	9 unit	1.484.889.780	11 unit	1.639.386.980	47 unit	12.691.066.780		
				IK Tujuan& Sasaran: Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	81%	85%		90%		95%		100%		100%		100%		100%			
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Output : Jumlah Prasarana air limbah yang dibangun	4 Unit	208 Unit	4.078.450.000	361 Unit	11.082.324.000	849 Unit	4.249.140.640	994 Unit	4.972.788.240	1188 Unit	5.939.559.120	1312 Unit	6.557.547.920	4.912 Unit	36.879.809.920		
				IK Tujuan& Sasaran: Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	72%	75%		77%		80%		82%		84%		85%		85%			
			Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	124.697 jiwa	133141 jiwa	13.134.501.400	140.108 jiwa	6.733.487.584	159.627 jiwa	16.415.419.980	178.897 jiwa	19.219.554.430	201.913 jiwa	22.965.791.590	227.323 jiwa	25.360.498.190	227.323 jiwa	103.829.253.174		
			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Output : Panjang drainase dibangun	12.180 m	13.000 m	13.134.501.400	3.054 m	6.733.487.584	16.465 m	15.415.419.980	19.270 m	18.219.554.430	23.016 m	21.465.791.590	25.410 m	23.860.498.190	100.215 m	98.829.253.174		
			Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong	Output : Panjang drainase direhab/pelihara						1.250 m	1.000.000.000	1.250 m	1.000.000.000	1.875 m	1.500.000.000	1.875 m	1.500.000.000	6.250 m	5.000.000.000		

	Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan		IK Tujuan& Sasaran: Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan	69%	72,60%		76,90%		81,20%		100%		100%		100%		100%	
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Luas permukiman kumuh yang tertangani	80,7 Ha	84,9 Ha	8.657.632.000	89,9 Ha	10.556.525.016	94,9 Ha	7.485.996.120	116,96 Ha	8.752.379.420	116,96 Ha	10.444.228.460	116,96 Ha	11.525.708.860	116,96 Ha	57.422.469.876
		Perencanaan pengembangan infrastruktur	Output : Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur	4 Dok	5 Dok	2.128.780.000	2 Dok	793.000.000	4 Dok	2.124.570.320	5 Dok	2.486.394.120	6 Dok	2.969.779.560	7 Dok	3.278.773.960	29 Dok	13.781.297.960
		Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Output : Jumlah infrastruktur strategis yang dibangun	4 Unit	7 Unit	6.528.852.000	4 Unit	9.763.525.016	3 Unit	5.311.425.800	3 Unit	6.215.985.300	4 Unit	7.424.448.900	4 Unit	8.196.934.900	25 Unit	43.441.171.916
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Waktu Monitoring, evaluasi dan pelaporan						12 bulan	50.000.000	12 bulan	200.000.000						
		Program Pembangunan Infrastruktur PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih			-	54.808 KK	25.914.699.800	54.811 KK	23.901.416.100	54.813 KK	27.971.933.850	54.816 KK	33.410.020.050	54.820 KK	36.886.207.050	54.820 KK	148.084.276.850
			Panjang jalan lingkungan permukiman yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang			-	255 Km		261 Km		265 Km		270 Km		275 Km		275 Km	
		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Output : Jaringan air bersih yang dibangun				1 unit	906.800.000	2 unit	1.593.427.740	2 unit	1.864.795.590	3 unit	2.227.334.670	4 unit	2.459.080.470	12 unit	9.051.438.470
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Output : - Panjang ruas jalan yang direhabilitasi				2 Km	2.150.454.600	3,5 Km	4.249.140.640	4 Km	4.972.788.240	4,5 Km	5.939.559.120	5 Km	6.557.547.920	19 Km	23.869.490.520
			- Jumlah jembatan yang direhabilitasi				2 buah		10 buah									
		PEMBANGUNAN dan Peningkatan Jalan Lingkungan PERMUKIMAN	Output : - Panjang peningkatan jalan lingkungan pemukiman				6 Km	22.857.445.200	12 Km	18.058.847.720	14 Km	21.134.350.020	16 Km	25.243.126.260	19 Km	27.869.578.660	67 Km	115.163.347.860
			- Panjang pembangunan jalan lingkungan pemukiman				300 meter		1.500 meter									
		Program Pembangunan Infrastruktur PERDESAAN	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	51.218 KK	52.117 KK	13.140.177.700											52.117 KK	403.901.500
			Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	250 Km	252 Km													
		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Output : Jaringan air bersih yang dibangun	2 unit	3 unit	403.901.500											3 unit	403.901.500
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Output : - Panjang ruas jalan yang direhabilitasi	10 Km	10 Km	2.157.741.200												2.157.741.200
			- Jumlah jembatan yang direhabilitasi	3 buah	5 buah													

			Peningkatan Jalan Perdesaan	Panjang peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang tertangani	17 Km	20 Km	10.578.535.000											10.578.535.000	
Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi			IK Tujuan& Sasaran: Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangannya	20%	25%		33%		35%		40%		45%		50%		50%	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah kawasan Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa yang ditangani	20 Di+DIR	20 Di+DIR	22.270.218.300	20 Di+DIR	14.765.816.600	20 Di+DIR	18.585.000.000	20 Di+DIR	18.575.000.000	20 Di+DIR	18.700.000.000	20 Di+DIR	20.700.000.000	20 Di+DIR	113.596.034.900
			Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Review Design Jaringan Irigasi/ Rawa	1 dok	2 dok	479.100.000	1 dok	220.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	125.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	7 dok	1.424.100.000
			Pembangunan Pintu Air	Bangunan Air yang dibangun	6 buah	4 buah	3.065.021.000												3.065.021.000
			Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi	Jaringan daerah irigasi kewenangan kabupaten yang direhabilitasi	1.400 m'	9.650 m'	6.098.797.000	5.000 m'	4.004.250.000	5.000 m'	6.825.000.000	5.200 m'	6.850.000.000	5.200 m'	6.850.000.000	5.200 m'	8.850.000.000	35.250 m'	39.478.047.000
				Jaringan daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dipelihara	21.400 m'	12.500 m'		10.000 m'		10.000 m'		10.000 m'		10.000 m'		10.000 m'		62.500 m'	
				Jaringan daerah irigasi rawa yang direhabilitasi	9.500 m'	27.000 m'		20.000 m'		20.000 m'		20.000 m'		20.000 m'		35.000 m'		142.000 m'	
				Jaringan daerah irigasi rawa yang dipelihara	129.700 m'	129.700 m'		180.000 m'		250.000 m'		250.000 m'		250.000 m'		300.000 m'		1.359.700 m'	
			Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	rapat komisi irigasi	1 kali	1 kali	182.650.000												182.650.000
			Pembangunan jaringan irigasi	Jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten yang dibangun	1 buah	1 buah	5.651.162.000	1 daerah	2.279.000.000	2 daerah	6.660.000.000	2 daerah	6.600.000.000	2 daerah	6.600.000.000	2 daerah	6.600.000.000	2 daerah	34.390.162.000
				Jaringan reklamasi rawa kewenangan kabupaten yang dibangun	29.850 m' 15 buah	21.295 m' 19 buah		300 m' 2 buah		36.295 m' 29 buah									
			Peningkatan jaringan irigasi	Jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten yang ditingkatkan	7.105 m'	5.000 m'	6.793.488.300	2.600 m'	8.262.566.600	4.000 m'	5.000.000.000	23.600 m'	35.056.054.900						
				Jaringan reklamasi rawa kewenangan kabupaten yang ditingkatkan	11.370 m'	13.000 m'		1.000 m'		1.000 m'		1.000 m'		1.000 m'		1.000 m'		18.000 m'	
Meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air baku	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat			IK Tujuan& Sasaran: Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	17%	18%		19%		20%		22%		24%		26%		26%	

			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani	4 buah	8 embung	2.220.067.100	5 embung	4.832.051.800	5 embung	7.875.000.000	5 embung	10.750.000.000	6 embung	13.600.000.000	6 embung	16.600.000.000	35 embung	55.877.118.900
			Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	4 buah	8 buah	2.220.067.100	5 buah	4.770.703.200	5 buah	7.825.000.000	5 buah	10.700.000.000	6 buah	13.500.000.000	6 buah	16.500.000.000	35 buah	55.515.770.300
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Waktu Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-			12 bulan	61.348.600	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	361.348.600
Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air			IK Tujuan& Sasaran: Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	12%	14%		16%		18%		20%		22%		25%		25%	
			Program Pembangunan turap/talud /beronjong	Persentase pembangunan turap/talud/bronjong	100%	100%	1.622.514.400												1.622.514.400
			Pembangunan turap/talud /beronjong	Bangunan Pengaman tebing	9 unit	9 unit	1.622.514.400												1.622.514.400
			Program pengendalian banjir	Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani	7 kawasan	7 kawasan	10.410.517.600	7 kawasan	10.871.616.600	7 kawasan	24.376.402.000	7 kawasan	30.194.089.000	7 kawasan	38.838.932.000	7 kawasan	41.266.682.000	7 kawasan	155.958.239.200
			Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Panjang kanal banjir yang dibangun	965,7 m'	1.280 m'	3.225.420.800	1.000 m'	3.398.750.000	2.300 m'	6.350.000.000	2.700 m'	7.200.000.000	4.850 m'	13.100.000.000	5.300 m'	13.250.000.000	17.430 m'	46.524.170.800
				Panjang kanal banjir yang direhabilitasi	13.400 m'	7.000 m'		7.000 m'		7.000 m'		7.000 m'		18.800 m'		8.800 m'		55.600 m'	
				Panjang kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	24.600 m'	37.500 m'		25.000 m'		162.500 m'									
	Meningkatnya upaya pengamanan pantai			IK Tujuan& Sasaran: Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	35%	40%		45%		47%		50%		52%		55%			
			Pembangunan prasarana pengamanan pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dibangun	156 m'	110 m'	2.064.317.000	150 m'	1.772.000.000	360 m'	8.500.000.000	450 m'	10.500.000.000	535 m'	12.588.000.000	600 m'	14.000.000.000	2.205 m'	49.424.317.000
			Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Normalisasi sungai yang dipelihara	11.950 m'	31.100 m'	5.120.779.800	20.000 m'	5.700.866.600	63.000 m'	9.526.402.000	85.000 m'	12.494.089.000	90.000 m'	13.150.932.000	96.000 m'	14.016.682.000	385.100 m'	60.009.751.400
				Normalisasi sungai yang dioperasikan dan dipelihara	58.000 m'	53.490 m'		50.000 m'		253.490 m'									
Menyediakan informasi tata ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang			IK Tujuan& Sasaran: Presentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci Tata Ruang kabupaten/Kota	-	-		16,67%		33,33%		50%		66,67%		100%		100%	

		Program Perencanaan, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN Tata Ruang	Cakupan informasi penataan ruang			1 kecamatan	898.340.000	1 kecamatan	3.064.285.000	1 kecamatan	3.586.146.000	1 kecamatan	4.283.336.000	2 kecamatan	4.729.001.000	6 kecamatan	16.561.108.000		
			Tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan wilayah pengendalian pemanfaatan ruang			6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan			
		penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan					2 dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	1 dok	1.000.000.000	5 dok	4.000.000.000		
		penyusunan rencana teknis ruang kawasan	jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan							1 dok	300.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	3 dok	1.300.000.000		
		penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan							1 dok	300.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	3 dok	1.300.000.000		
		penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	jumlah dokumen PERDA tentang RDTRK							1 peraturan	100.000.000	1 peraturan	100.000.000	1 peraturan	100.000.000	3 peraturan	300.000.000		
		Survey dan Pemetaan	Jumlah Peta Analog			1 peta	634.629.800	1 peta	1.764.000.000	1 peta	1.580.000.000	1 peta	1.800.000.000	2 peta	2.200.000.000	6 peta	7.978.629.800		
		Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah peraturan perijinan pemanfaatan ruang									1 peraturan	83.336.000	1 peraturan	129.001.000	2 peraturan	212.337.000		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	waktu monitoring, evaluasi dan pelaporan			12 Bulan	94.925.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	126.146.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	581.071.000		
		Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah kegiatan (sosialisasi)			1 kegiatan	168.785.200	1 kegiatan	180.285.000	1 kegiatan	180.000.000	1 kegiatan	180.000.000	1 kegiatan	180.000.000	1 kegiatan	889.070.200		
		TOTAL PAGU INDIKATIF					264.885.579.000		150.000.000.000		306.428.409.000		358.614.531.576		428.333.588.437		472.900.088.968		1.968.425.920.781

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai bidang urusannya mendukung pencapaian sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi dengan indikator sasaran RPJMD adalah **Indeks Williamson**. Adapun indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terkait kinerja penyelenggaraan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	77,57	78,34	79,13	79,92	80,72	81,52	81,52
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	77,46	83,10	88,73	94,37	100	100	100
3	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	77	79	82	90	95	100	100
4	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85	90	95	100	100	100	100
5	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	75	77	80	82	84	85	85

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
6	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dipertanian	72,6	76,9	81,2	100	100	100	100
7	Persentase tersedianya air irigasi untuk mendukung pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangannya	25	33	35	40	45	50	50
8	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	18	19	20	22	24	26	26
9	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	14	16	18	20	22	25	25
10	Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	40	45	47	50	52	55	55
11	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci Tata Ruang kabupaten/Kota	N/A	16,67	33,33	50	66,67	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas/Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2017-2022 atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dukungan, koordinasi, dan partisipasi dari seluruh aparatur baik Struktural maupun Fungsional dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah, baik bersifat administratif, maupun teknis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini, diucapkan terima kasih